



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 275 /KPTS/BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 212/KPTS/BAPPEDA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (TPPS)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/12276/Bangda tanggal 27 November 2023 hal Peningkatan Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) semula Kepala Daerah diubah menjadi Sekretaris Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Definitif;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 212 / KPTS / BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan maka diperlukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan;

7. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);

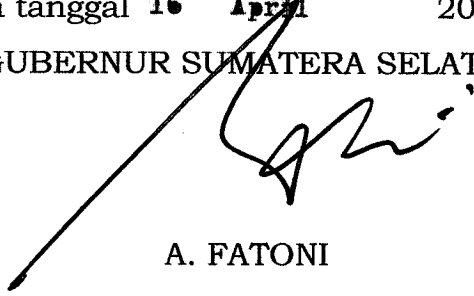
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nomor 212/KPTS/BAPPEDA/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 April 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Kepala BKKBN RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
6. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel di Palembang